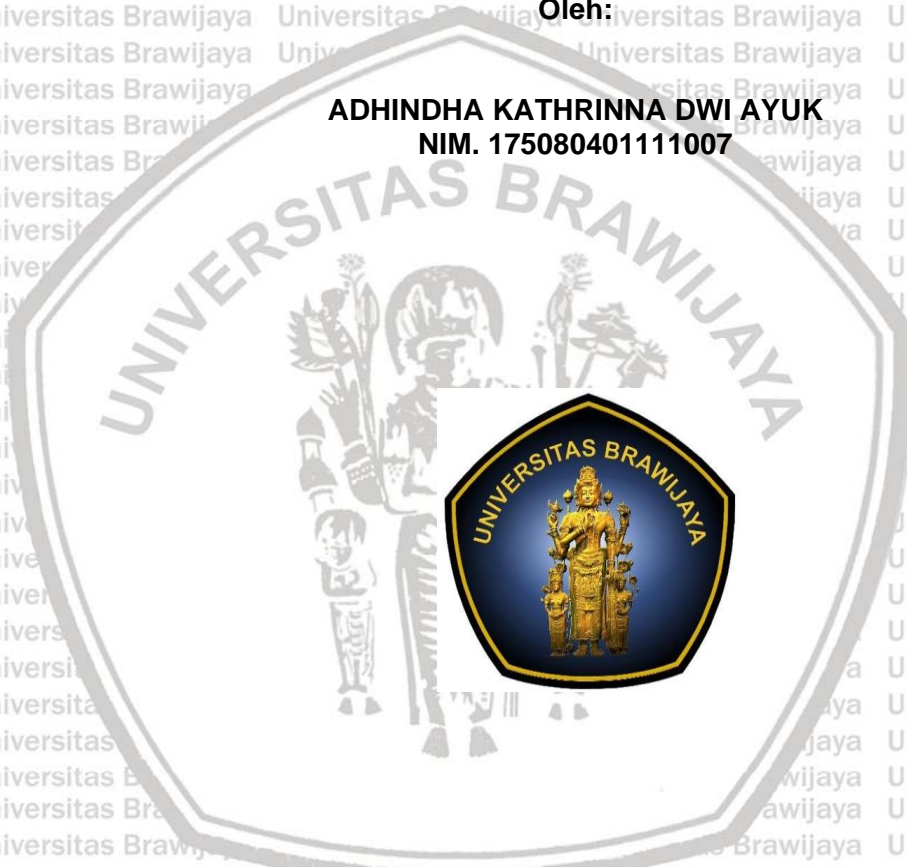


**LITERATURE REVIEW : PERANAN PANGLIMA LAOT DALAM
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN KEARIFAN
LOKAL DI PERAIRAN ACEH**

SKRIPSI

Oleh:

**ADHINDHA KATHRINNA DWI AYUK
NIM. 175080401111007**



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

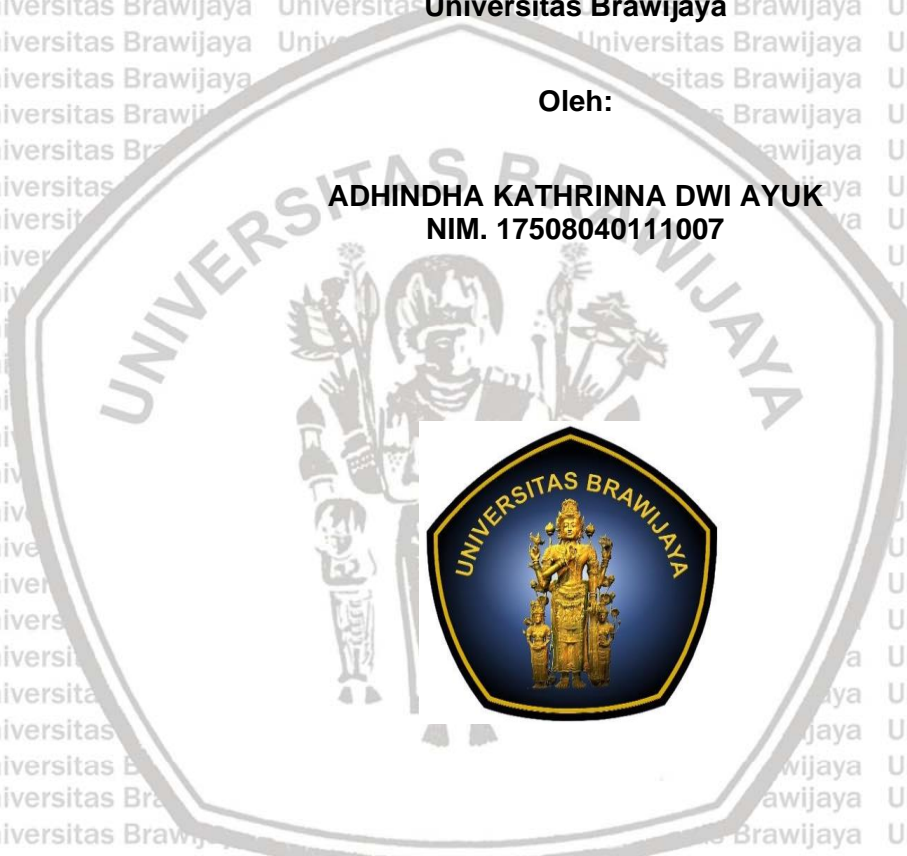
**LITERATURE REVIEW : PERANAN PANGLIMA LAOT DALAM
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN KEARIFAN
LOKAL DI PERAIRAN ACEH**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya**

Oleh:

**ADHINDHA KATHRINNA DWI AYUK
NIM. 17508040111007**



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

SKRIPSI

LITERATURE REVIEW : PERANAN PANGLIMA LAOT DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN KEARIFAN LOKAL DI PERAIRAN ACEH

Oleh:

ADHINDHA KATHRINNA DWI AYUK
NIM. 175080401111007

Telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 15 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,
Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Dr. Ir. Edi Susilo, MS
NIP. 19591205 198503 1 003
Tanggal: 7/23/2021

Candra Adi Intyas, S.Pi., MP
NIP. 2017048 50613 2 001
Tanggal: 7/23/2021

Mengetahui:
Ketua Jurusan
Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan



Dr. Ir. Edi Susilo, MS
NIP. 19591205 198503 1 003
Tanggal: 7/23/2021

IDENTITAS TIM PENGUJI

Judul : Literature Review: Peranan Panglima Laot Dalam
Pengelolaan Perikanan Tangkap Dan Kearifan Lokal Di
Perairan Aceh

Nama Mahasiswa : Adhindha Kathrinna Dwi Ayuk

NIM : 175080401111007

Program Studi : Agrobisnis Perikanan

PENGUJI PEMBIMBING:

Pembimbing 1 : Dr. Ir. Edi Susilo, MS.

Pembimbing 2 : Candra Adi Intyas, S.P., MP.

PENGUJI BUKAN PEMBIMBING

Dosen Penguji 1 : Wahyu Handayani, S.Pi., MP., MBA.

Dosen Penguji 2 : Mariyana Sari, S.Pi., MP.

Tanggal Ujian : 15 Juli 2021



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga laporan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya suatu hambatan. Penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi dengan baik, tegas, dan bijaksana, memberi ilmu yang belum saya ketahui dalam penelitian ini, serta memberikan arahan dan perlakuan yang baik saat memberikan revisi laporan skripsi dan memberi semangat untuk laporan skripsi agar terselesaikan dengan tepat waktu.
2. Ibu Candra Adi Intyas S.Pi, MP selaku dosen pembimbing II yang juga telah membimbing dengan baik dan memberikan arahan dalam penyusunan laporan skripsi agar segera terselesaikan.
3. Kedua Orangtua saya Bapak Sujar dan Ibu Wartini serta kakak kandung Aprillya Sujarwati Putri dan adek kandung Bimo Abimanyu atas restu, doa, semangat dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Teman-teman Geng Menjelang S.Pi yang selalu kompak terkait memberi semangat dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini, selalu memberi motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
5. Teman-teman program studi Agrobisnis Perikanan 2017 yang selalu memberi kabar terkait alur penyelesaian skripsi dari jalur online (karena pandemi Covid-19), dan juga saling *support* agar semangat untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Teman sehari-hari saya di Magetan Nanda Santika Putri dan Aprillia Denta Sari yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.

7. Bagian akademik, jurusan, umum dan keuangan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

8. *Last but not least, i wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Malang, 15 Januari 2021

Penulis



RINGKASAN

Adhindha Kathrinna Dwi Ayuk. Literature Review: Peranan Panglima Laot Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Dan Kearifan Lokal Di Perairan Aceh (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Edi Susilo, MS.** dan **Candra Adi Intyas, S.Pi., MP.**)

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Banyaknya sumberdaya yang dihasilkan dari wilayah pesisir, maka perlu adanya pengelolaan wilayah pesisir tersebut. Pengelolaan wilayah pesisir telah diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007. Pengelolaan wilayah pesisir tersebut selalu melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya khususnya masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di NKRI. Masyarakat hukum adat selalu berhubungan dengan budaya dan kearifan lokal. Salah satu provinsi yang memiliki peran serta masyarakat hukum adat yaitu Panglima Laot di provinsi Aceh. Panglima laot merupakan bentuk kearifan lokal yang tumbuh dari komunitas masyarakat Aceh. Penelitian *literature review* ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah Panglima laot dan bagaimana peran spesifik Panglima laot dalam pengelolaan perikanan tangkap dan kearifan lokal yang ada di Provinsi aceh.

Metode yang digunakan pada penelitian literature review ini adalah *systematic literature review* (SLR). *Systematic literature review* (SLR) merupakan metode *literature review* yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada tiga (3) tahapan yang dilakukan pada metode *systematic literature review* (SLR) yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Hasil dari penelitian *literature review* ini adalah Panglima Laot sudah ada sejak abad ke-14 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Aceh Darussalam. Panglima laot sendiri memiliki 3 tingkatan kelembagaan yaitu: Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lhok. Peran Panglima Laot dalam mengelola perikanan tangkap seperti halnya membuat peraturan mengenai proses penangkapan ikan, pemasangan lat tangkap serta pelarangan perusakan ekosistem dan juga mengatur sanksi bagi masyarakat nelayan di Aceh jika melanggar aturan. Saat pengelolaan perikanan tangkap tersebut terdapat hambatan dan kendala yang dialami oleh Panglima Laot. Panglima laot juga berperan dalam pengelolaan kearifan lokal yang ada di Aceh seperti yang sudah dijelaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti melestarikan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan Aceh. Panglima laot dalam menjalankan tugasnya tersebut juga bekerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga masyarakat yang ada di Aceh, seperti halnya dalam pembuatan kebijakan Instansi pemerintah dan lembaga masyarakat tersebut seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi Laut, dan Syahbandar. Diharapkan dengan adanya kerjasamanya Panglima laot dengan instansi pemerintah tersebut bisa membantu dalam pengelolaan perikanan tangkap dan kearifan lokal agar lebih memajukan dalam perikanan tangkap dan kearifan lokal yang ada di Aceh.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan yang benar dan terang.

Penyusunan laporan skripsi dengan judul “Literature Review: Peranan Panglima Laot Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Dan Kearifan Lokal Di Perairan Aceh sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Laporan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam penelitian selanjutnya sekaligus menambah wawasan ataupun gambaran dan informasi mengenai hukum adat pada nelayan tradisional di Indonesia.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, saya berharap kepada berbagai pihak khususnya dosen pembimbing untuk memberikan masukan yang bersifat membangun untuk menjadikan laporan ini lebih baik.

Malang, 15 Januari 2021

Adhindha Kathrinna Dwi Ayuk
NIM.175080401111007

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

IDENTITAS TIM PENGUJI iv

UCAPAN TERIMA KASIH v

RINGKASAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

1. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 6

2. METODE REVIEW 7

2.1 Metode Review 7

2.1.1 Konsep Dasar *Literature Review* 7

2.1.2 Tahap Pembuatan *Literature Review* 8

2.2 Kerangka *Literature Review* 13

2.2.1 Kerangka Literatur Review 14

3. HASIL REVIEW 16

3.1 Sejarah Kelembagaan Panglima Laot 16

3.1.1 Struktur Kelembagaan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Panglima Laot 20

3.2 Peran Panglima Laot dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Aceh 23

3.2.1 Menangani Tata Cara Penangkapan Ikan 24

3.2.2 Penanganan Larangan Perusakan Ekosistem 27

3.2.3 Menetapkan Hari Pantang Melaut 28

3.2.4 Hambatan Panglima Laot 29

3.2.5	Tantangan dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap	31
3.2.6	Konflik Pengelolaan Perikanan Tangkap	32
3.2.7	Keikutsertaan Pemerintah dalam Mendukung Panglima Laot untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap di Aceh	33
3.3	Peran Panglima Laot dalam Pengelolaan Kearifan Lokal Di Aceh	39
3.3.1	Kearifan Lokal Di Aceh yang Masih Terkait dengan Panglima Laot	41
3.3.2	Keikutsertaan Pemerintah dalam Mendukung Panglima Laot untuk Pengelolaan Kearifan lokal Di Aceh	45
4.	KESIMPULAN DAN SARAN	48
4.1	Kesimpulan	48
4.2	Saran	49
4.2.1	Saran Akademis	49
4.2.2	Saran Praktis	50
	DAFTAR PUSTAKA	51



DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

Tabel 1. Kata Kunci dan Jumlah Artikel yang Digunakan.....	12
Tabel 2. Struktur Kelembagaan Panglima Laot Provinsi, Panglima Laot Kabupaten/Kota, Panglima Laot Lhok.....	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

Gambar 1. Langkah-Langkah <i>Review</i> Artikel.....	8
Gambar 2. Langkah-Langkah Tahapan <i>Literatur Review</i> dengan Metode <i>Systematic Literature Review</i>	9
Gambar 3. Kerangka Berfikir <i>Literature Review</i>	14



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir merupakan daerah yang peralihannya berada diantara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan didarat dan laut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007.

Sumberdaya pesisir terdiri dari unsur hayati dan non hayati. Unsur hayati dari sumberdaya pesisir yaitu terdiri dari perikanan (*plankton, benthos*, ikan, *mollusca, crustacea*, mamalia), hutan mangrove, terumbu karang dan juga padang lamun. Sedangkan unsur non hayati dari sumberdaya pesisir yaitu terdiri dari minyak, gas bumi, karang mati, dan bahan tambang seperti timbal, timah, dan tembaga (Primyastanto *et al.*, 2010). Wilayah pesisir juga memiliki fungsi sebagai penyedia sumberdaya alam, penyedia jasa, pendukung kehidupan, dan penyedia jasa keamanan (Asyiawati dan Akliyah, 2014). Wilayah pesisir menghasilkan banyak sumberdaya alam, sehingga wilayah pesisir membutuhkan pengelolaan atau kebijakan untuk membatasi pemanfaatan yang berlebihan dari masyarakat.

Pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir memiliki peran yang penting. Pengelolaan wilayah pesisir harus senantiasa berpijak pada aturan- aturan yang telah diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007. Asas dan tujuan menjadi pijakan pertama dalam pengelolaan wilayah pesisir (Dahuri, 2018).

Pemanfaatan wilayah pesisir saat pelaksanaannya selalu menggunakan asas peran serta masyarakat dan keadilan. Asas peran serta masyarakat sendiri yaitu: (a) masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan memiliki peran dalam proses perencanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan yang terakhir pengendalian, (b) memiliki informasi yang cukup yang nantinya

digunakan untuk mengetahui kebijaksanaan dari pemerintah dan dapat memiliki akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil, (c) menjamin akan adanya ikeikutsertaan suara masyarakat dalam keputusan- keputusan yang dikeluarkan, (d) memanfaatkan sumber daya yang sudah ada secara baik dan adil. Asas keadilan yakni asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Asas peran serta masyarakat tersebut termasuk penting karena menjelaskan pentingnya melibatkan masyarakat saat proses pengelolaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya sendiri yaitu masyarakat hukum adat (Yurista, 2016).

Istilah adat sendiri berasal dari Bahasa Arab, yang artinya dalam Bahasa Indonesia yaitu kebiasaan. Adat atau kebiasaan merupakan sebuah tingkah laku seseorang yang dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan cara tertentu yang diikuti oleh masyarakat luar dengan proses waktu yang lumayan lama (Yulia, 2016). Masyarakat Hukum Adat sendiri adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal atau hidup di wilayah geografis tertentu yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara turun temurun, karena adanya sebuah ikatan dengan para leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam, memiliki pranata pemerintah adat, dan juga tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Yurista, 2016).

Masyarakat hukum adat berhubungan dengan budaya dan kearifan lokal.

Menurut Daniah (2016), kearifan lokal merupakan kepintaran yang timbul dari manusia yang dimiliki oleh sekelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal merupakan hasil dari masyarakat tertentu melalui beberapa pengalaman mereka dan belum tentu

dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut biasanya selalu melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang yang berbentuk tata nilai di kehidupan yang juga menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Di daerah-daerah yang lain juga pasti memiliki kearifan tradisional masing-masing yang merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat Indonesia dan secara turun-temurun terus dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tinggal di daerah masing-masing, dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwasannya bisa dilihat dari segi lingkungan hidup, adanya kearifan lokal tradisional juga menguntungkan bagi masyarakat, karena secara langsung ataupun tidak langsung adanya kearifan lokal ini bisa membantu pemeliharaan lingkungan dan juga bisa ikut mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kesombongan dan keserakahan yang dimiliki manusia bisa saja merusak kelestarian lingkungan hidup, maka dari itu kearifan lokal juga berguna untuk produk kolektif masyarakat agar tidak menegah kesombongan dan keserakahan manusia.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang juga mengelola wilayah pesisir dan juga termasuk dalam masyarakat hukum adat yaitu lembaga Panglima Laot di provinsi Aceh (Fitrah, 2018). Menurut Yulindawati (2017), Panglima Laot sendiri keberadaannya tumbuh ditengah-tengah masyarakat nelayan Aceh. Tugasnya juga termasuk dalam memimpin kelompok-kelompok yang menjadi pengurus Hukum Adat Laot yang pada saat itu sudah dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun (1607-1637) dari Kesultanan Aceh Darsussalam. Pada masa lalu, Panglima Laot merupakan lembaga yang menjadi perpanjangan dari kedaulatan Sultan untuk wilayah maritim di Aceh. Untuk pengambilan sebuah keputusan, Panglima Laot juga bekerjasama

dengan seorang *uleebalang*, yang menjadi pengelola dalam wilayah administratif. Pada zaman dahulu dan mungkin juga sampai sekarang, hukum adat laot selalu dikembangkan dengan berbasis syariah islam. Didukung juga dengan keberadaanya yang berada di Provinsi Aceh, yang mana provinsi ini termasuk provinsi yang agama islamnya sangat kuat di Indonesia. Hukum adat laot menetapkan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Panglima Laot seperti halnya dalam mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*), menetapkan waktu penangkapan ikan, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antar nelayan dengan pemerintah daerah atau biasa disebut dengan adaptor sosial, hal ini berguna agar nantinya jika pemerintah akan mengeluarkan sebuah kebijakan diharapkan selalu berkoordinasi dengan masyarakat karena memiliki hubungan yang baik.

Panglima Laot merupakan lembaga atau sistem yang terbentuk dari kearifan lokal dari masyarakat Aceh. Keberadaan kearifan lokal yang berbentuk hukum adat laot beserta seisinya tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Pada tahun 2001 lembaga Panglima Laot merumuskan bahwa hukum adat laot adalah "hukum-hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai". Hukum adat laot tersebut berhubungan dengan beberapa aturan-aturan yang telah ada, seperti halnya aturan tentang penangkapan ikan, aturan bagi hasil, aturan mengenai pengupahan dan sebagainya, aturan tentang pencurian ikan di laot, aturan kecelakaan di laot, aturan tempat penjemuran alat penangkapan ikan/memperbaiki kerusakan-kerusakan baik alat apenangkapan ikan maupun perahu aturan sewa menyewa, aturan yang menangani kerusakan di lingkungan

laot, aturan menegenai upah atau pengganti dari pekerjaan syang sudah dilakukan Panglima Laot dan atau pawang, aturan mengenai larangan melakukan kegiatan di laot/pantang laot, aturan mengenai pertengkaran/perselisihan dan perkelahian di laut, dan juga semua aturan-aturan laot yang berhubungan dengan semua kegiatan mencari nafkah oleh masyarakat Aceh di laut (Rizqi *et al.*, 2018).

Terjadinya musibah atau bencana yang menimpa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 lalu telah merusak hampir seluruh wilayah kawasan pesisir. Bencana yang telah terjadi tersebut tidak hanya merusak kawasan pesisir Aceh sendiri tetapi juga merenggut korban jiwa yang jumlahnya sangat banyak, dan juga merusak sarana infrastruktur, pemukima warga, saran dan prasarana publik dan juga merusak ek tersebut tidak hanya merenggut korban jiwa manusia yang sangat banyak, tetapi juga merusak infrastruktur, pemukiman, sarana dan prasarana publik yang tersedia. Pengelolaan kawasan perairan Aceh yang juga berbasis kearifan lokal, belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah sendiri. Padahal dengan berbasis kearifan lokal pemerintah bisa mempertimbangkan kawasan perairan Aceh agar nantinya bisa mempertimbangkan pemanfaatan daerah penangkapan. Kebijakan-kebijakan yang khusus mengatur tentang pemanfaatan daerah penangkapan ikan juga masih jarang terdengar. Jarangnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang mengakibatkan terlambatnya pengelolaan kawasan perairan Aceh sendiri khususnya kearifan lokal dan perikanan tangkap, maka dari itu perlunya pengelolaan yang melibatkan juga masyarakat hukum adat Aceh khususnya lembaga Panglima Laot (Rizqi *et al.*, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas mengenai perlunya pengelolaan perikanan tangkap dan kearifan lokal yang lebih spesifik,

yang ditangani oleh masyarakat hukum adat yang juga bekerjasama dengan para intansi pemerintah sperti KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Polisi Perairan dan juga Syahbandar, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana struktur adat Panglima Laot dan bagaimana perannya dalam pengelolaan perikanan tangkap dan kearifan lokal di Aceh.

1.2 Tujuan

Tujuan dari *literature review* mengenai peranan Panglima Laot dalam pengelolaan perikanan tangkap dan kearifan lokal di perairan Aceh adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa itu Panglima Laot
2. Untuk menganalisis peran Panglima Laot dalam pengelolaan perikanan tangkap di Aceh
3. Untuk menganalisis peran Panglima Laot dalam pengelolaan kearifan lokal di Aceh



2. METODE REVIEW

2.1 Metode Review

Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *literature review*.

2.1.1 Konsep Dasar *Literature Review*

Literature review merupakan sebuah kegiatan dengan cara survei artikel ilmiah, buku dan sumber lain yang berhubungan dengan topik atau masalah yang akan dibahas baik di bidang penelitian atau teori yang bisa memberikan informasi mengenai deskripsi, ringkasan, dan kritis evaluasi. *Literature review* dibuat untuk memberikan gambaran terhadap sumber-sumber yang sudah dieksplorasi saat meneliti topik tertentu dan untuk menunjukkan kepada pembaca bagaimana penelitian yang dilakukan cocok ke bidang studi yang lebih besar (Ramdhani *et al.*, 2014).

Menurut Wahono (2020), metode *systematic literature review* (SLR) merupakan metode yang ada di dalam *literature review* yang penggunaannya biasanya dengan cara mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang penting pada sebuah topik penelitian, agar nantinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah ditentukan dalam sebuah penelitian yang sudah ditentukan. Metode *systematic literature review* ini dilakukan dengan prosesi terurut dengan mengikuti tahapan dan protokol yang memungkinkan proses *literature review* terhindar dari bias dan pemahaman yang bersifat subyektif dari penelitiannya. Metode SLR ini sudah banyak digunakan pada penelitian-penelitian yang saat ini dilakukan. Metode ini bisa digunakan saat masa pandemi covid-19, karena tidak perlu adanya penelitian lapang yang biasanya harus

dilakukan dalam penelitian-penelitian, sehingga pencarian data atau informasi yang dibutuhkan bisa dengan mencari informasi secara online dengan cara mencari jurnal-jurnal atau buku atau juga bisa berita yang telah ada.

2.1.2 Tahap Pembuatan *Literature Review*

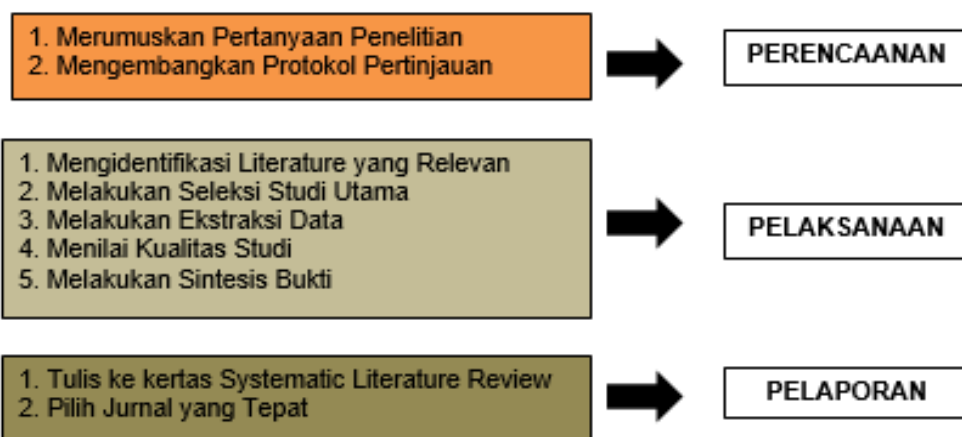
Pada proses pembuatan *literature review* menurut pedoman penulisan review Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, memiliki beberapa tahapan yang dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Sumber: Pedoman Penulisan Review FPIK UB, 2020.

Gambar 1. Langkah-Langkah Review Artikel

Sedangkan pada metode yang saya gunakan pada penelitian *literature review* ini saya menggunakan *systematic literature review* yang mana metode ini juga termasuk dalam metode *literature review*. Metode *systematic literature review* juga memiliki beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian, berikut adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Wahono, 2020

Gambar 2. Langkah-Langkah Tahapan *Literatur Review* dengan Metode *Systematic Literature Review*

Berdasarkan gambar 2, langkah-langkah pembuatan *literature review* adalah sebagai berikut:

a. Planning (Perencanaan)

Menurut Wahono (2020), *Research Question* (RQ) adalah bagian awal dan dasar berjalannya *Systematic Literature Review*. *Research Question* digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk membantu dalam proses pencarian dan ekstraksi literatur. Analisis dan sintesis data, sebagai hasil dari *Systematic Literature Review*, adalah jawaban dari *Research Question* yang sudah kita tentukan di awal. *Research Question* yang baik adalah yang bermanfaat, terukur, arahnya ke pemahaman terhadap *state of the art research* dari suatu topik penelitian.

Formulasi *Research Question* harus didasarkan pada lima elemen yang terkenal dengan sebutan PICOC:

1. *Population* (P): Target group dari investigasi
2. *Intervention* (I): Aspek detail dari investigasi, atau isu yang menarik bagi peneliti

3. *Comparison (C)*: Aspek dari investigasi dimana *Intervention (I)* akan dibandingkan

4. *Outcomes (O)*: Efek dan hasil dari *Intervention (I)*

5. *Context (C)*: *Setting* dan lingkungan dari investigasi

Menurut Wahono (2020), langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menyusun protokol *Systematic Literature Review (SLR Protocol)*.

Protokol *Systematic Literature Review* adalah rencana yang berisi prosedur dan metode yang kita pilih dalam melakukan *Systematic Literature Review*.

Secara umum protokol *Systematic Literature Review* biasanya memuat 7 elemen yang digunakan dalam proses pelaksanaan protokol *Systematic Literature Review* seperti di bawah ini:

1. *Background*: Latar belakang
2. *Research Questions*: Pertanyaan penelitian
3. *Search terms*: Istilah yang akan digunakan saat pencarian informasi
4. *Selection criteria*: Kriteria seleksi
5. *Quality checklist and procedures*: Daftar periksa dan prosedur kualitas
6. *Data extraction strategy*: Strategi ekstraksi data
7. *Data synthesis strategy*: Strategi sintesis data

Tahapan *literature review* yang diteliti oleh penulis, yang pertama yaitu merencanakan *research questions* dan setelah itu menyusun protokol *systematic literature review*, sesuai dengan tahapan pada metode *systematic literature review*. Pada *literature review* yang sudah diteliti oleh peneliti yaitu dengan memformulasikan pertanyaan apa yang akan penulis jawab atau bisa disebut juga dengan topik apa yang penulis bahas di *literature review* tersebut. Topik yang akan dibahas yaitu peran Panglima Laot dalam pengelolaan perikanan tangkap dan kearifan lokal di perairan Aceh. Penulis mengambil topik tersebut, karena Panglima Laot erat

kaitannya dengan masyarakat nelayan dan Panglima Laot juga sebagai tugasnya adalah tentang mengelola perikanan dan kearifan lokal yang ada di Aceh.

Setelah merencanakan topik yang dibahas, selanjutnya yaitu menyusun protokol *systematic literature review*. Protokol *systematic literature review* yaitu seperti data apa saja yang akan penulis cari, bagaimana menyeleksi data-data tersebut agar mendapatkan data yang sesuai dan benar. Pada *literature review* yang dilakukan oleh penulis, penulis juga menerapkan protokol seperti itu, dengan mencari data-data jika menggunakan jurnal diutamakan menggunakan data 10 tahun terakhir, agar data tersebut masih baru saja dilakukan.

b. Conducting (Pelaksanaan)

Menurut Wahono (2020), tahapan *conducting* adalah tahapan yang berisi pelaksanaan dari *systematic literature review*, dimana seharusnya sesuai dengan protokol *systematic literature review* yang telah kita tentukan. Dimulai dari penentuan *keyword* pencarian literatur (*search string*) yang basisnya adalah dari PICOC yang telah kita desain di depan. Pemahaman mengenai sinonim dan alternatif yang digunakan sebagai pengganti kata akan menentukan keakuratan informasi pencarian *literatur* kita. Langkah selanjutnya yaitu menentukan sumber (*digital library*) dari pencarian *literatur*, karena *literatur* yang kita kumpulkan akan sangat banyak, mungkin ratusan atau ribuan artikel, maka disarankan untuk menggunakan *tool/software* untuk mempermudah kita mengelola literatur seperti *Mendeley*, *Zotero*, *EndNote*, dsb.

Menurut Wahono (2020), setelah semua *literatur* diperoleh, langkah selanjutnya yaitu dengan memilih *literatur* yang sesuai dengan topik penelitian. Gunanya yaitu untuk mempermudah proses kita dalam

pengambilan informasi yang digunakan. Selanjutnya yaitu pada proses *filtering* dari *literature* yang sudah dipilih, selain menggunakan cara *inclusion and exclusion criteria*, peneliti juga harus melakukan penilaian kualitas (*quality assesment*) dari ratusan *literatur* yang yang sudah kita temukan. Langkah terakhir yaitu setelah mendapatkan *literatur* yang kita inginkan atau yang sduah sesuai dengan topik penelitian, yaitu dengan mengekstraksi data (*data extraction*), dan juga melakukan pencampuran informasi atau data-data yang sudah kita dapatkan dari dari *literatur-literatur* yang sudah kita pilih (*synthesis of evidence*). Tujuan utama dari sintesis data adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai hasil penelitian dari berbagai *literatur*, dan untuk memilih metode yang paling tepat agar bisa memebri penejelasan dengan tepat dan mengintrepretasikan dari berbagai temuan atau informasi yang sudah ditemukan.

Pada tahap kedua ini, penulis sudah menentukan beberapa kata kunci yang akan digunakan untuk proses pencarian dari *literature-literature* yanga akan digunakan nantinya saat proses penyusuna penelitiann tersebut. Penulis juga sudah mendapatkan beberapa jurnal dan buku yang sudah sesuai dengan kriteria yang digunakan. Berikut ini adalah keyword dan jumlah jurnal dan buku yang digunakan:

Tabel 1. Kata Kunci dan Jumlah Artikel yang Digunakan

No	Kata Kunci Pencarian	Search Engine	Jumlah Artikel
1.	Kearifan Lokal	Google Scholar, Google Book	6
2.	Hukum Adat	Google Scholar, Google Book	7
3.	Panglima Laot	Google Scholar, Google Book	13
4	Local Culture	Google Scholar	2
5	Kelembagaan	Google Scholar	2
6	Struktur Kelembagaan	Google Scholar, Google Book	3
Total			33

c. **Reporting (Pelaporan)**

Menurut Wahono (2020), *reporting* adalah tahapan terakhir dengan menyusun dan menulis hasil dari metode *systematic literature review* dalam bentuk tulisan, yang nantinya dapat dipublikasikan ke masyarakat luar dalam bentuk paper ke jurnal ilmiah atau untuk menyusun bab 2 tentang *Literature Review* dari skripsi/tesis/disertasi kita. Struktur penulisan dari *systematic literature review* biasanya terdiri dari 3 tahapan, yaitu: Pendahuluan (*Introduction*), Utama (Main Body) dan Kesimpulan (*Conclusion*). Bagian pendahuluan akan berisi latar belakang dan landasan mengapa *systematic literature review* pada suatu topik itu penting dan harus dilakukan dalam penelitian tersebut. Sedangkan bagian utama akan berisi mengenai protokol-protokol *systematic literature review*, hasil analisis dan sintesis yang ditemukan, serta diakhiri dengan diskusi yang membahas implikasi dari hasil *systematic literature review*. Bagian kesimpulan atau tahap terakhir menjelaskan mengenai rangkuman dari data yang kita dapatkan.

Pada tahapan terakhir ini, penulis akan memulai menulis atau menyusun data yang didapatkan dari beberapa jurnal dan buku yang sudah didapatkan dengan menggunakan kata kunci yang sudah ditentukan sebelumnya. Penulis mulai menyusun informasi dan data-data yang didapatkan yang berkaitan dengan apa saja peran Panglima Laot dalam mengelola perikanan tangkap dan kearifan lokal di Aceh.

2.2 **Kerangka Literature Review**

Proses pembuatan *literature review* membutuhkan sebuah kerangka berfikir/kerangka analisis sebagai penggambaran alur berfikir penulis agar nantinya bisa memberikan penjelasan mengenai topik yang akan diteliti atau dibahas. Penulis juga membuat *outline* laporan untuk mempermudah dalam

proses penulisan *literatur review*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kerangka berfikir/kerangka analisis dan *outline* laporan yang telah dibuat oleh penulis:

2.2.1 Kerangka Literatur Review

Menurut Unaradjan (2019), kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan digunakan sebagai acuan dasar dalam proses penelitian. Gambaran dalam kerangka berpikir nantinya akan menjelaskan mengenai hubungan atau keterkaitan antar variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian nantinya akan dijelaskan secara rinci dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.

Pada proses pembuatan *literature review* mengenai peranan Panglima Laot dalam pengelolaan perikanan tangkap dan kearifan lokal di perairan Aceh, penulis juga membuat kerangka berfikir dengan mengacu pada contoh kerangka analisis yang sudah dijelaskan tadi, harapan penulis dengan membuat kerangka berfikir yaitu agar mempermudah menjelaskan tentang konsep dari *literature review* yang akan dijelaskan nantinya pada bab hasil. Berikut ini adalah kerangka berfikir yang dibuat oleh penulis:



Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Gambar 3. Kerangka Berfikir *Literarture Review*

Pada gambar 2 kerangka berfikir menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan perikanan tangkap yang dilakukan oleh Panglima Laot yang juga bekerjasama dengan Pemerintah dan Kearifan Lokal Aceh. Panglima Laot sendiri memiliki struktur kelembagaan dan peran dalam pengelolaan perairan Aceh. Berdasarkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan kearifan lokal di Aceh, maka bisa didapatkan titik temu yaitu hasil mengenai peranan Panglima Laot dalam pengelolaan perikanan tangkap dan kearifan lokal di Perairan Aceh.



3. HASIL REVIEW

3.1 Sejarah Kelembagaan Panglima Laot

Menurut Fauzi (2005), kelembagaan adalah sebuah gugus aturan (*rule of conduct*) formal (hukum, kontrak, sistem politik, organisasi, pasar, dan lain sebagainya) serta informal (norma, tradisi, sistim nilai, agama, tren sosial, dan lain sebagainya) yang digunakan dalam mengkoordinasi hubungan anatara individu ataupun kelompok. Pada bidang perikanan dan kelautan, kelembagaan biasanya dikenal sebagai suatu *institutional arrangement* (pengaturan kelembagaan) yang lebih mengutamakan aspek *institutions of governance* (lembaga pemerintahan). *Institutional arrangement* pada dasarnya adalah *arrangement* antarunit ekonomi yang mengatur bagaimana anggota institusi tersebut bersaing maupun bekerja sama.

Menurut Abdullah *et al.*, (2006), istilah laot sendiri adalah istilah yang diambil dari bahasa Aceh yang artinya laut sedangkan panglima artinya yaitu pemimpin, maka Panglima Laot dapat diartikan sebagai pemimpin laut. Panglima laot merupakan suatu sistem adat yang berada dikalangan masyarakat nelayan Aceh. Keberadaan Panglima Laot sendiri sudah ada sejak abad ke-14 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa itu, Panglima Laot merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Panglima Laot pada saat itu dikembangkan dengan berbasis Syariah Islam, pada saat itu Panglima Laot bertugas memungut cukai pada kapal-kapal yang singgah di pelabuhan dan juga bertugas dalam memobilisasi rakyat terutama nelayan untuk berperang. Setelah adanya Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dimana kerajaan sudah tidak ada dan digantikan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas

Panglima Laot mulai berubah menjadi, menangani mengenai tata cara penangkapan ikan di laut, bagi hasil dan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran dilaut. Tetapi dari masa itu sampai dengan tahun 1982, Panglima Laot masih berdiri secara sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing, baik di desa, mukim ataupun kecamatan atau dikenal dengan Panglima Laot Lhok/kuala/dermaga tempat boat di tambat. Saat itu Panglima Laot belum begitu dikenal oleh orang banyak.

Menurut Zulmanysah (2017), struktur kelembagaan Panglima Laot bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Pada perjalanan yang dijalani Panglima Laot selama kurang lebih 400 tahun tersebut, Panglima Laot juga dapat diartikan sebagai warisan budaya yang masih ada dan berfungsi di wilayah masyarakat Aceh sendiri, tetapi dengan seiringnya perubahan yang dialami pada peta perpolitikan pada masa penjajahan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan pasca diadakannya sebuah kesepakatan *Helsinki*, sehingga terjadinya perubahan dari fungsi, tugas dan wewenang yang akan dilaksanakan oleh Panglima Laot kedepannya.

Menurut Zulmansyah (2017), setelah adanya Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, tugas, fungsi dan wewenang Panglima laot sedikit berubah yaitu mengatur mengenai bagaimana cara penangkapan ikan di laut seperti halnya penggunaan *meupayang* (pukat), menjaring, memancing ikan di laut dan alat tangkap yang lain dan juga bertugas menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi antara para nelayan di masyarakat Aceh sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, Panglima Laot memutuskan akan tetap menjalankan peran sebelumnya yaitu sebagai penegak hukum adat laot yang menangani beberapa masalah yang ada di Aceh dan Panglima Laot sendiri merupakan lembaga yang masih sangat dihargai dan juga lembaga yang cukup populer di masyarakat nelayan di Aceh.

Menurut Abdullah *et al.*, (2006), setelah terjadinya tsunami pada tahun 2006, ada beberapa profil kelembagaan yang sudah dibuat, dengan mencantumkan spesifikasi program lembaga Panglima Laot yang mencakup: a) penguatan masyarakat nelayan, b) penguatan hukum adat laot masyarakat nelayan, c) pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, d) program beasiswa untuk belajar dari kalangan nelayan miskin, dan e) memelihara lingkungan dari kerusakan.

Menurut Abdullah *et al.*, (2006), proses pemilihan Panglima Laot, antara lhok, kabupaten dan kota, dan provinsi, hampr-hampir sama. Proses Panglima Laot Lhok, berturut sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Panglima Laot Lhok biasanya dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun sekali atau bisa juga dilakukan jika diperlukan mendadak
- 2) Proses pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat
- 3) Calon minimal 5 orang atau lebih, calon tersebut dipilih oleh pawang-pawang yang berada dalam wilayah lhok yang bersangkutan, dengan persyaratan: taat beragama, pernah menjadi pawang, bisa membaca dan menulis, bertempat tinggal atau asli dari wilayah kerja lhok tersebut, dan usia calon diharuskan minimal 25 tahun
- 4) Forum harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah pawang yang bertugas di daerah terkait, jumlah kedatangan pawang tersebut sangat penting karena dijadikan acuan untuk proses pemilihan agar dianggap sah, proses pemilihan tersebut disaksikan oleh para Pembina (Dinas Perikanan dan Kelautan dan Camat)
- 5) Calon yang nantinya akan memperoleh suara terbanyak pertama akan langsung ditetapkan menjadi Panglima Laot, suara terbanyak kedua menjadi wakil, suara terbanyak ketiga menjadi sekretaris, terbanyak keempat menjadi bendahara, dan terbanyak kelima menjadi wakil bendahara.

Sedangkan proses pemilihan Panglima Laot Kabupaten/Kota ada beberapa perbedaan sedikit yaitu:

- 1) Calon minimal 3 orang, dipilih oleh Panglima Laot Lhok yang ada dalam wilayah kabupaten/kota tersebut, dengan persyaratan: taat beragama, pernah menjadi pawang, bisa membaca dan menulis, berdomisili di wilayah kerja kabupaten/kota, ada dukungan dari pemilih, usia minimal 40 tahun
- 2) Pengalaman yang cukup di bidang laut
- 3) Forum harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Panglima Laot Lhok yang bertugas di daerah terkait, jumlah kedatangan tersebut sangat penting karena dijadikan acuan untuk proses pemilihan agar dianggap sah, proses pemilihan tersebut disaksikan oleh Pembina (Bupati dan Kepala Dinas Perikanan)

Selanjutnya yaitu proses pemilihan Panglima Laot Provinsi ada juga beberapa perbedaan yaitu, sebagai berikut:

- 1) Dipilih untuk masa waktu selama 5 tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan
- 2) Calon minimal 5 orang, dipilih oleh Panglima Laot Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan persyaratan: taat beragama, pernah menjadi pawang, bisa membaca dan menulis, bertempat tinggal di Provinsi Aceh, serta ada dukungan dari pemilih (Panglima Laot Kabupaten/Kota), ketersediaan calon dengan pernyataan tertulis
- 3) Forum harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Panglima Laot Kabupaten/Kota yang bertugas di daerah terkait, jumlah kedatangan tersebut sangat penting karena dijadikan acuan untuk proses pemilihan agar dianggap sah, proses pemilihan tersebut disaksikan oleh Pembina (Gubernur dan Kepala Dinas Perikanan)
- 4) Calon yang nantinya akan memperoleh suara terbanyak pertama akan langsung ditetapkan menjadi Panglima Laot, selanjutnya suara terbanyak kedua akan menjadi wakil, suara terbanyak ketiga akan menjadi sekretaris, suara terbanyak keempat akan menjadi bendahara, dan yang terakhir suara terbanyak kelima akan menjadi anggota

- 5) Apabila nantinya didapati jumlah suara yang sama dalam pemilihan tersebut, maka akan diambil keputusan secara mufakat.

3.1.1 Struktur Kelembagaan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Panglima Laot

Menurut Waluya (2004), istilah struktur berasal dari kata *structum* yang berasal dari bahasa latin yang artinya sendiri yaitu menyusun. Struktur juga diartikan sebagai susunan terhadap sesuatu yang memiliki bagian-bagian atau unsur-unsur dan membentuk suatu susunan. Jadi, struktur kelembagaan juga bisa diartikan sebagai susuna-susunan yang ada disebuah kelembagaan.

Menurut Nuraini (2013), Panglima Laot sebagai sebuah kelembagaan memiliki struktur kelembagaan untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Struktur kelembagaan yang ada di lembaga Panglima Laot di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam diketahui terdiri atas 3 tingkatan. Struktur kelembagaan yang dimiliki oleh ketiga tingkatan lembaga Panglima Laot berbeda-beda, karena semakin tinggi kedudukannya akan semakin luas daerah pengelolaan yang akan ditangani baik dari masalah-masalah yang muncul dan juga menangani dari segi yang lain. Berikut ini ada penjelasan mengenai tugas dari tingkatan-tingkatan yang ada di struktur kelembagaan Panglima Laot:

1. Panglima Laot Provinsi

- Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot
- Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan
- Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot
- Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir laut
- Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
- Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal

2. Panglima Laot Kabupaten/Kota dan

a) Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengurus antara lintas Lhok; dan

b) Menyelesaikan permasalahan atau konflik antar Panglima Laot Lhok.

3. Panglima Laot Lhok.

a) Melaksanakan tugas-tugas yang sudah ditetapkan pada ayat 3 (a) yang mengurus antara blintas Kab/Kota

b) Memberikan bantuan kepada para masyarakat nelayan serta memberikan pembelaan kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain, serta juga mengurus pelaksanaan hukom adat laot

Berikut ini adalah rincian orang-orang yang bertugas pada kelembagaan yang ada pada Panglima Laot Provinsi, Panglima Laot Kabupaten/Kota dan Panglima Laot Lhok:

Tabel 2. Struktur Kelembagaan Panglima Laot Provinsi, Panglima Laot Kabupaten/Kota, Panglima Laot Lhok

Panglima Laot Provinsi	Panglima Laot Kabupaten/Kota	Panglima Laot Lhok
a. 9 orang anggota dewan pertimbangan	a. 3 orang penasehat	a. 3 orang penasehat
b. 2 orang penasehat	b. 1 ketua (Panglima Laot Kabupaten/ Kota)	b. 1 ketua (Panglima Laot Lhok)
c. 1 ketua umum (Panglima Laot Aceh)	c. 1 wakil ketua	c. 1 wakil ketua
d. 5 ketua	d. 3 sekretaris	d. 3 sekretaris
e. 1 sekeretaris umum	e. 1 bendahara	e. 1 bendahara
f. 3 sekretaris		
g. 1 bendahara		
h. 1 wakil bendahara		

Sumber: Nuraini, 2013

Struktur kelembagaan yaitu berguna untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang dilakukan oleh Panglima Laot. Menurut Panglima Laot Aceh (2021), Panglima Laot memiliki beberapa tugas, fungsi dan wewenang yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh Panglima Laot Lhok, Panglima Laot

Kabupaten/Kota dan juga oleh Panglima Laot Provinsi. Berikut ini adalah penejelasan mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari Panglima Laot yang harus dilaksanakan:

A. Tugas

1. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
2. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
3. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
4. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
5. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
6. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal ;
7. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.

B. Fungsi

1. Berfungsi sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan Aceh;
2. Berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan
3. Berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menyukkseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.

C. Wewenang

1. Menentukan atau mengatur mengenai tata tertib penangkapan ikan (meupayang), yang meliputi seperti penentuan pembagian hasil

penangkapan dan juga menentukan hari-hari dilarang melaut melaut bagi para masyarakat nelayan;

2. Menyelesaikan permasalahan dan perselisihan adat yang telah terjadi di kalangan masyarakat nelayan;

3. Menyelesaikan permasalahan adat yang terjadi antara para Panglima Laot lhok atau nama lain; dan

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Menurut KKP (2021), pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilakukan oleh Panglima laot tentu saja dibantu oleh *Peutimang Peeng* atau *Keurani*. Panglima Laot sendiri merupakan pemimpin pawang-pawang (pemilik kapal/kapten) di daerah yang dikelola, yang juga bertanggung jawab kepada sultan dengan perantara *uleebalang*. Selanjutnya Panglima Laot juga memiliki andil di dalam struktur pemerintahan adat yang biasanya disebut dengan *mukim*. *Mukim* sendiri merupakan beberapa gabungan dari beberapa kelurahan atau desa. Pemerintahan adat *mukim* sampai saat ini eksistensinya masih terjaga atau masih terkenal di kalangan masyarakat Aceh dan juga pemerintahan adat ini telah diakui pada perundang-undangan yang ada di wilayah Provinsi Aceh.

3.2 Peran Panglima Laot dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Aceh

Panglima Laot merupakan sebuah sistem hukum adat yang keberadannya ada di masyarakat Aceh yang dipergunakan untuk menjaga ketertiban saat dilakukannya pengelolaan a perikanan tangkap dan juga mengelola kehidupan masyarakat nelayan. Menurut UU Nomor 45 Pasal (1) Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan bahwasannya pengelolaan perikanan tangkap adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi,

analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati yang ada di perairan dan juga tujuan yang telah disepakati oleh pihak yang terkait.

Menurut Mustaqim (2018), peran Panglima Laot dalam pengelolaan perikanan tangkap yaitu seperti, peran dalam menangani tata cara penangkapan ikan, peran dalam menangani larangan dalam perusakan ekosistem, dan peran dalam menetapkan hari pantang melaut demi menjaga kesehatan ekosistem laut.

Panglima Laot dalam menjalankan penanannya juga ikut didukung oleh pemerintah dengan cara membuat sebuah sistem atau model yang digunakan untuk pengelolaan perikanan tangkap. Berikut adalah penjelasan mengenai peran-peran Panglima Laot dan keikutsertaan pemerintah dalam pengelolaan perikanan tangkap:

3.2.1 Menangani Tata Cara Penangkapan Ikan

Pada pengelolaan perikanan tangkap, perlu adanya tata cara penangkapan ikan agar dalam proses berlangsungnya tidak merusak ekosistem yang sudah ada dan tidak saling merugikan antar nelayan. Menurut KKP (2021), panglima laot menangani tentang tata cara penangkapan ikan di perairan Aceh seperti tata cara mengenai pemasangan tuasan, rumpon dan bubu dan juga tata cara saat meletakkan tuasan di laut. Tuasan, rumpon dan bubu sendiri merupakan salah jenis-jenis alat bantu penangkapan ikan yang penggunaannya dengan cara dipasang di laut oleh para nelayan. Tuasan, rumpon dan bubu bertujuan untuk menarik gerombolan ikan-ikan agar berkumpul disekitar tempat nelayan agar ikan mudah ditangkap. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tata cara pemasangan tuasan:

1. Pemasangan alat bantu penangkapan seperti tuasan, rumpon dan bubu sebaiknya diberi tanda pengenal berupa pelampung bulat besar atau bambu yang dipasang dengan baik agar nantinya mudah dilihat dan dikenali agar nantinya tidak tertabrak oleh alat tangkap atau kapal nelayan yang lain.
2. Bila suatu saat terjadi kejadian tabrakan antar tuasan, rumpon, bubu dengan alat penangkapan ikan dan pukat yang lain secara tidak disengaja, maka kerusakan yang terjadi tersebut tidak akan diganti. Beda hal jika kerusakan yang diakibatkan oleh tabrakan yang disengaja, maka harus diganti sebesar 100% dari harga tuasan, rumpon dan bubu yang mengalami kerusakan. Para nelayan harus memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat II setempat untuk pemasangan alat bantu penangkapan seperti tuasan, rumpon dan bubu. Jika para nelayan tidak mempunyai surat izin tersebut maka kerusakan yang dialami tidak berhak mendapat ganti rugi.
3. Jika adat alat bantu penangkapan seperti tuasan, rumpon dan bubu yang ditemukan di laut dan tidak diberi tanda pengenal dan suatu saat mengalami tabrakan, maka tidak akan diganti dan pemilik dari tuasan, rumpon dan bubu tersebut diharuskan mengganti ke orang yang menabrak.
4. Alat tangkap seperti pukat banting, pukat langgar, dan beberapa jenis pukat yang lain diizinkan menangkap ikan pada malam hari dengan syarat harus melakukan dengan jarak ± 500 meter dari tuasan/unjam yang telah dipasang oleh nelayan yang lain.

Sedangkan saat meletakkan tuasan juga memiliki tata cara agar nantinya bisa meletakkan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tata cara peletakkan tuasan:

1. Saat meletakkan alat bantu penangkapan ikan seperti tuasan di laut juga diperlukan tata cara yang baik dan benar, hal ini diperuntukkan untuk kapal nelayan yang memasang tuasan di laut tersebut. Untuk kapal-kapal pukat

langgar atau pukat banting, apabila nantinya dalam memasang tuasan jarak

yang dibutuhkan antara tuasan kapal satu dengan tuasan kapal yang lain

diharuskan dengan jarak kurang lebih 1 mil sehingga nantinya tidak akan

mengganggu pengguna kapal yang lain.

2. Untuk sebuah kapal jaring yang menggunakan alat jaring atau tanggok bawal, jarak yang digunakan antara satu tuasan dengan tuasan kapal yaitu kurang lebih 500 meter, dengan jarak tersebut nantinya bisa mengurangi gangguan jaring anatar kapal yang lain.

3. Terkecuali untuk kapal-kapal yang memasang tuasan atau meletakkan tuasan yang pertama kali, dianjurkan tetap menggunakan pedoman yang mengatur mengenai pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti tuasan, rumpon dan bubu yang dimulai dari arah darat dengan tujuan ke laut atau sebaliknya sehingga nantinya bisa tersusun dengan baik dan sempurna.

Menurut Yulindawati (2017), masyarakat nelayan Aceh banyak mengenal teknik-teknik penangkapan ikan yang ramah bagi lingkungan dan juga teknik tersebut pastinya telah diatur atau dianjurkan oleh Hukum Adat Laot. Contoh teknik-teknik penangkapan tersebut dengan menggunakan *Palong*, *Pukat langgar*, *Pukat Aceh*, *Perahoe Kawe*, *Jalo*, *Jeue*, *Jareng*, *Kawe go*, *Kawe tiek*, *Bubee*, dan *Sawok/Sareng*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa teknik yang digunakan saat perosesi penangkapan ikan di laut::

1. *Palong* merupakan alat tangkap yang masih termasuk dalam kelompok jaring yang berbentuk persegi panjang yang dibentangkan secara horisontal menggunakan kayu atau bambu sebagai kerangkanya. *Palong* dibangun di atas perahu atau didirikan di tengah laut. Jenis-jenis ikan yang ditangkap antara lain: *bileh bu* (teri nasi), *suree* (tongkol), *noh* (cumi-cumi).

2. *Pukat* biasanya digunakan di sekitar pantai atau sekitar muara. *Pukat* dioperasikan dalam penggunaannya dilakukan dengan cara laboh darat atau

menggiring dan menarik pukat yang telah diulur dari laut ke arah pantai. Pukat ini hanya bisa digunakan di sekitar pantai yang tidak berkarang dan hanya boleh dilakukan di lokasi-lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Panglima Laot, karena jika dilokasi yang berkarang akan mengakibatkan daerah karang rusak.

3. *Perahoe kawé* yaitu teknik penangkapan ikan dengangan menggunakan pancing (*handline*) atau jalo/jala. Teknik ini biasanya digunakan di teluk atau laguna (*pusong*) untuk proses penangkapan ikan.

4. *Jeue* dan *Jareng* berasal dari bahasa Aceh yang artinya jaring. Jadi, teknik ini merupakan teknik yang menggunakan jaring saat proses penangkapan dengan menggunakan jaring.

5. *Kawe go* dan *Kawe tiek* berasal dari bahasa Aceh yang artinya pancing lempar/kail lempar. Jadi, teknik penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pancing lempar/kail lempar.

6. *Bubee* berasal dari bahasa Aceh yang artinya bubu. Jadi, teknik penangkapan ikan dengan menggunakan bubu.

7. *Sawok/Sareng* dari bahasa Aceh yang artinya menyaring. Jadi, teknik penangkapan dengan cara menyaring.

3.2.2 Penanganan Larangan Perusakan Ekosistem

Menurut Imran dan Yamao (2014), Aceh sebagai daerah otonom memiliki posisi tawar yang kuat dan melalui UU Nomor 11/2006 telah diberikan kewenangan secara khusus untuk mengelola kawasan konservasi perairan. UU ini memberikan ruang kepada Pemerintah Aceh agar melibatkan para kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang sudah lama ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan juga sudah cukup terkenal di kalangan masyarakatnya sendiri, yaitu lembaga Panglima Laot yang menangani sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang sudah ditentukan.

Panglima laot juga menerapkan beberapa jenis sanksi saat berlangsungnya proses pengelolaan/penangkapan ikan. Penelitian yang dilakukan oleh Apriana (2016), menyatakan bahwa Panglima Laot menetapkan beberapa jenis sanksi yang akan digunakan untuk seseorang yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan seperti berikut ini: 1. Peringatan/teguran, 2. Kewajiban melaksanakan ada *khanduri*, 3. Dilarang mempergunakan perahu untuk melaut dalam jangka waktu tertentu, 4. Penarikan hasil tangkapan, 5. Denda, 6. Perampasan alat tangkap yang membahayakan. Adanya sanksi yang diterapkan, diharapkan bisa berpengaruh kepada pola perilaku dari masyarakat itu sendiri. Efek psikologis dari sanksi adat jauh lebih besar dibandingkan dengan sanksi dalam hukum formal, sehingga akan ada dua kecenderungan untuk mengartikan sanksi tersebut dalam hukum adat yaitu sebagai suatu rangsangan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu pelanggaran.

3.2.3 Menetapkan Hari Pantang Melaut

Sulaiman (2010), menyatakan bahwa hari-hari pantang melaut, antara lain:

- a. Hari *khanduri* adat laot biasanya dilakukan selambat-lambatnya kurang lebih 3 tahun sekali atau tergantung dengan kesepakatan dan kesanggupan dari para nelayan setempat. Hari *khanduri* dilaksanakan 3 hari pantang melaut pada acara *khanduri*, hari tersebut dihitung sejak keluarnya matahari pada hari *khanduri* hingga matahari tenggelam pada hari ketiga hari *khanduri*.
- b. Hari Jumat dilarang melaut 1 (satu) hari penuh (dengan ketentuan setelah shalat boleh melaut tetapi tidak boleh mengadakan kegiatan penangkapan ikan)
- c. Hari Raya Idul Fitri, saat hari raya ini nelayan aka dilarang melaut selama 4 hari, dihitung dari terbenamnya matahari sebelum hari raya sampai dengan terbenamnya matahari pada hari ke-3 (tiga) hari raya.
- d. Hari Raya Idul Adha, saat hari raya ini nelayan akan dilarang melaut selama 4

hari, dihitung dari terbenamnya matahari sebelum hari raya sampai dengan terbenamnya matahari pada hari ke-3 (tiga) hari raya.

e. Hari Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus dilarang melaut selama 1 hari terhitung mulai tenggelamnya matahari pada tanggal 16 Agustus hingga terbenamnya matahari pada 17 Agustus.

f. Pada tanggal 26 Desember juga diterapkan hari pantang melaut 1 (satu) hari penuh, yang sudah disepakati dalam Rapat Dewan Meusapat Panglima Laot se-Aceh di Banda Aceh pada 9-12 Desember 2005, untuk mengenang terjadinya bencana gempa dan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004.

g. Serta beberapa hari peringatan lain, seperti Maulid Nabi dan sebagainya.

3.2.4 Hambatan Panglima Laot

Menurut Kelana (2018), Panglima Laot dalam menjalankan perannya khususnya peran dalam pengelolaan perikanan tangkap, diharuskan untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin saat kegiatan penegakkan hukum adat laot di wilayah Aceh. Diutamakan juga dalam kegiatan penanganan pelanggaran dan masalah-masalah pada masyarakat adat yang terjadi di Provinsi Aceh. Panglima Laot mempunyai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugasnya seperti contoh dibawah ini:

1. Tidak Adanya Dana Operasional

Tidak diberikannya dana operasional untuk lembaga Panglima Laot dalam menjalankan perannya merupakan sebuah hambatan. Dana tersebut sangat dibutuhkan dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di Provinsi Aceh, jika tidak diberikan maka akan terhambat dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

Tidak adanya dana operasional yang diberikan dari pemerintah, karena hal tersebut saat proses penyelesaian masalah, Panglima Laot terpaksa memilih

untuk mengumpulkan dana sumbangan dari para nelayan-nelayan yang berada di wilayah Aceh agar nantinya tetap menjalankan proses-proses persidangan penyelesaian kasus yang sudah terjadi.

2. Terbatasnya Kapal Pengawasan

Terbatasnya kapal-kapal pengawasan yang dimiliki menjadi salah satu hambatan utama dalam proses penjagaan potensi sumberdaya perikanan di Provinsi Aceh. Ketidakseimbangan antara jumlah kapal dengan luasnya laut yang ada di Aceh mengakibatkan tidak sebandingnya pengelolaan perikanan tangkap. Kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian oleh pemerintah agar menambah lagi kapal pengawas untuk menunjang saat proses pengawasan kapal-kapal yang ada di laut.

3. Kurangnya Bantuan dari Para Nelayan

Panglima Laot saat proses melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan seharusnya dibantu oleh para. Tetapi dari para nelayan sendiri kontribusi nelayan sangatlah minim.

Menurut narasumber Tabrani Sulaiman yang merupakan seorang Panglima Laot di wilayah Lampulo memebrikan pernyataan bahwasannya para Panglima laot bekerja secara sukarela, saat menjalankan tugasnya tersebut kami tidak diberi gaji, rokok atau minum saja juga tidak disediakan saat proses rapat dalam proses persidangan, terkadang kami membeli sendiri dengan memakai uang pribadi.

Pada tugas yang lain seperti saat pencatatan (pengarsipan) data-data yang berhubungan dengan pendataan jga tidak disediakan baik minuman atau makanan. Sedangkan menurut narasumber yang bernama Sayuti yang juga merupakan seorang Panglima Laot Lhok Pasie Tibang menyatakan bahwasannya anggaran yang akan digunakan oleh Panglima Laot Lhok itu sebenarnya ada, tetapi anggara yang diberikan tersebut berhenti di Panglima Laot Kota dan anggaran tersebut tidak kunjung diberikan kepada Panglima Laot Lhok

(Gampong). Selain itu pemerintah sendiri juga sangat jarang melakukan kunjungan ke lapangan, khususnya sendiri ke wilayah lembaga Panglima Laot Lhok Pasie Tibang untuk melihat apa saja hambatan yang ada di wilayah tersebut.

4. Sarana dan Prasarana yang Terbatas

Kurangnya sarana dan prasana yang bisa membantu dalam pengelolaan perikanan tangkap juga mengakibatkan sedikit terlambatnya pengelolaan perikanan tangkap.

Adanya hambatan-hambatan tersebut, diharapkan dari pemerintah sendiri bisa lebih memperhatikan kembali seperti contohnya saja memberi dana operasioanl kepada Panglima Laot dan juga ikut menambahkan kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan. Jika pemerintah Aceh memperhatikan hambatan-hambatan yang dialami oleh Panglima Laot dan memberikan solusi untuk hambatan tersebut, bisa jadi hambatan tersebut tidak akan terjadi.

3.2.5 Tantangan dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap

Menurut Sulaiman (2013), terkurasnya ikan di perairan Aceh ini bukan karena nelayan Aceh. Kemampuan nelayan Aceh untuk mengambil sumberdaya sangat terbatas. Terkurasnya ikan tersebut karena adanya kapal asing yang tidak terkontrol. Dinas Kelautan dan Perikanan mendapati beberapa maslah dilapang dalam bidang kelautan dan perikanan yang menyangkut dengan hukum adat laot, antara lain seperti kondisi sebagian besar masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya dalam katagori masyarakat miskin. Pada saat bersamaan tersebut, juga terjadi kegiatan illegal fishing, unregulated dan unreported fishing di perairan pantai timur Aceh (termasuk Kabupaten Pidie Jaya) yang sudah tidak terkendali. Perseteruan dari beberapa pihak tersebut tidak seimbang karena armada tangkap nelayan di kawasan tersebut yang rata-rata masih tradisional,

berarti bisa disimpulkan seharusnya tidak perlu adanya perseteruan tersebut karena pihak yang terkait juga tidak seimbang dan terlebih lagi tidak adanya dukungannya sarana dan prasarana perikanan tangkap yang memadai.

Disamping itu juga tantangan yang dihadapi yaitu seperti permasalahan tahun 2020 tentang dikeluarkannya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Menurut Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) (2020), menyatakan bahwasannya nelayan dan penduduk yang berada di Indonesia seharusnya dijadikan prioritas untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya perikanan

wilayah laut di Indonesia, pernyataan ini sesuai dengan UUD Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Tetapi dengan dikeluarkannya UU Cipta Kerja tersebut, akan membawa kembali Indonesia seperti kondisi yang terdahulu, dimana pada saat itu keadaannya yaitu sumberdaya perikanan kebanyakan dieksploitasi oleh korporasi besar yang bermodal dari asing. Melihat pengalaman yang dahulu, pada saat itu tingkat pelaku usaha sangatlah rendah, pengawasan tentang kepatuhan sulit dilakukan karena pada saat itu sulit membedakan mana yang *legal* dan *illegal*, masih banyak juga ditemukan praktik penggadaian izin, pendapatan negara juga rendah karena *under-reported* dan praktik alih muat hasil tangkapan secara *illegal*, serta tindak pidana yang lain yang masih sering terjadi. Keadaan tersebut berimbas pada para nelayan-nelayan kecil yang banyak terdesak oleh kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia, sehingga para nelayan tersebut banyak kehilangan akses melaut yang juga berimbas ke ekonomi para masyarakat nelayan sendiri.

3.2.6 Konflik Pengelolaan Perikanan Tangkap

Menurut web berita Serambinew.com (2021), pada tanggal 13 April 2021, sedikitnya, 32 nelayan Aceh Timur yang dituduh masuk secara ilegal ke wilayah perairan Thailand, empat hari lalu ditangkap pihak keamanan laut setempat. Terkait penangkapan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh melaporkannya ke

kementerian terkait agar nelayan-nelayan itu mendapat pendampingan. Beberapa bulan yang lalu, Bapak M Adli Abdullah selaku dosen senior yang ada di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) yang selama ini juga masih aktif mengadvokasi dan mendampingi nelayan, mengingatkan supaya semua pihak kompak dalam memberi bantuan hukum dan bantuan lainnya kepada para nelayan yang tertangkap oleh aparat keamanan di luar negeri. "Untuk urusan itu memerlukan tindakan yang cermat dan cepat," kata Adli yang pernah menjadi Sekretaris Panglima Laot Aceh.

Seorang pengurus lembaga nelayan Aceh juga pernah mengatakan bahwa tertangkapnya nelayan Aceh di wilayah perairan Thailand, Myanmar, India, Malaysia, dan lain-lain, salah satu sebab adalah lemahnya pengetahuan nelayan Aceh tentang batas wilayah laut serta kapal motor mereka tidak dilengkapi alat navigasi yang canggih. Akibatnya, nelayan sering melewati batas perairan saat mencari ikan.

3.2.7 Keikutsertaan Pemerintah dalam Mendukung Panglima Laot untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap di Aceh

Menurut KKP (2021), pengelolaan perikanan tangkap di Aceh selalu melibatkan instansi pemerintah daerah Aceh. Instansi pemerintah tersebut seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh lalu bekerja sama dengan masyarakat hukum adat contohnya saja Panglima Laot. Panglima laot sendiri merupakan lembaga yang berjalan dibawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, dan Panglima laot memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda.

Menurut KKP (2021), Ditjen Perikanan Tangkap memiliki fungsi dan tugas yang sudah ditentukan oleh KKP. Tugas dari Ditjen Perikanan Tangkap sendiri yaitu

yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Sedangkan fungsi dari Ditjen Perikanan Tangkap

yaitu:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;

f. Pelaksanaan administrasi Ditjen Perikanan Tangkap; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Menurut Rizqi (2017), Panglima Laot saat menjalankan tugasnya dibantu oleh instansi pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Syahbandar, dan

Polisi perairan. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Panglima Laot selalu mendapatkan mbimbingan yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, bimbingan tersebut biasanya mengenai teknologi penangkapan hasil laut dan juga mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah, terutama juga yang menyangkut dalam hal penangkapan ikan. Hukum adat laut juga mengembangkan sistem pelaporan untuk menjaga lingkungan laut. Sistem tersebut seperti contohnya saja jika ada seorang nelayan atau mayarakat yang lain yang suatu saat melihat ada oknum-oknum yang melanggar peraturan mengenai lingkungan hidup, maka diharuskan segera melaporkan ke Panglima Laot atau kepada pihak yang berwajib. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana tugas Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi Perairan dan Syahbandar dalam membantu panglima laot dalam menjalankan tugasnya:

a. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki beberapa fungsi untuk membantu panglima laot saat menjalankan tugasnya. Fungsinya yaitu sebagai berikut:

- Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil
- Pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal

pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);

- Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 4 mil;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 4 mil;

- Pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- Pelaksanaan fasilitasi terhadap dukungan teknis seperti mengeluarkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- Pembinaan UPTD; dan
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

b. Polisi Perairan

Tugas dari Polisi Perairan yaitu mengamankan perairan laut pun merupakan bagian penting kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang berhubungan atau berkaitan dengan perairan laut.

c. Syahbandar

Syahbandar memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2008 Tentang pelayaran. Pada pasal 207 ayat (1) menjelaskan bahwasannya fungsi dari syahbandar sendiri yaitu melaksanakan keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

Menurut Daudy (2015), menyatakan juga bahwasannya Pemerintahan Aceh juga ikut berwenang untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan, seperti dalam Pasal 162 ayat 1 dan 2 UUPA (Undang-Undang

Pemerintahan Aceh). Pada ayat 1 disebutkan bahwasannya Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang hidup di laut wilayah Aceh. Sedangkan pada ayat 2 yaitu menjelaskan tentang apa saja kewenangan yang akan dilaksanakan untuk pengelolaan Sumber Daya Alam yang hidup di laut seperti halnya dibawah ini:

- a. Konservasi dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di laut
- b. Aturan yang mengatur mengenai administrasi, perizinan penangkapan dan pembudidayaan ikan
- c. Pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya
- e. Pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut
- f. Keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan NKRI

Selain itu, pada Pasal 162 ayat 3 UUPA menjelaskan bahwasannya Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota juga berhak dalam mengeluarkan suat izin untuk pengusahaan sumber daya alam yang ada dilaut dan juga untuk penangkapan ikan yang ada di wilayah Aceh sekitar Aceh. Sedangkan pada Pasal 162 ayat 4 UUPA menjelaskan bahwasannya dalam pengelolaan mengenai Sumber Daya Alam di wilayah laut harus selalu menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian hidup yang sudah tercantum pada UUPA.

Keikutsertaan pemerintah dalam pengelolaan perikanan tangkap di Provinsi Aceh dengan mengeluarkan keputusan-keputusan tersebut diharapkan dapat menunjang pengelolaan perikanan tangkap. Keputusan yang dikeluarkan pemerintah tersebut juga bagus untuk masyarakat nelayan, agar mengurangi kerusakan yang ditimbulkan jika terlalu berlebihan saat penangkapan ikan. Sampai saat ini juga belum ditemukan permasalahan/konflik antara panglima laot dengan

pemerintah, itu menjelaskan bagaimana hubungan yang saling mendukung antara panglima laot dan pemerintah untuk kemajuan pengelolaan perikanan tangkap.

Berdasarkan hasil diatas, dapat dikatakan bahwasannya peranan panglima laot dalam pengelolaan perikanan tangkap di Aceh sendiri lebih spesifik mengatur dalam proses penangkapan ikan, pemasangan alat tangkap yang digunakan, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan serta peraturan mengenai larangan dalam merusak ekosistem. Pengelolaan tersebut bekerjasama dengan instansi pemerintah seperti KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Polisi Perairan serta Syahbandar, kerjasama tersebut dimaksudkan agar pengelolaan bisa berjalan dengan lancar dan bisa membantu masyarakat nelayan Aceh sendiri.

3.3 Peran Panglima Laot dalam Pengelolaan Kearifan Lokal Di Aceh

Kearifan lokal merupakan bentuk kebijaksanaan yang dibuat oleh masyarakat atau sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu dengan didasari nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan dijaga keberlangsungannya secara turun temurun dari masyarakat tersebut. Kearifan lokal sendiri dalam masyarakat biasanya berupa budaya, etika, kepercayaan, norma, aturan-aturan khusus, adat istiadat, dan masih banyak yang lain. Panglima laot sendiri bisa disebut juga dengan kearifan lokal yang diciptakan oleh masyarakat Aceh.

Menurut KKP (2021), Panglima Laot adalah pihak diberi tanggung jawab dalam pelestarian adat dan juga kebiasaan yang masih berlangsung di masyarakat nelayan dan bertugas juga sebagai pihak yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Tanggung jawab yang diberikan tersebut seperti dibawah ini:

- a. Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat laut dan adat laot
- b. Mengkoordinasikan dan mengawasi setiap usaha penangkapan ikan laut (adat

meupayang)

c. Menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi diantara sesama nelayan atau kelompoknya

d. Mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laot (*khanduri* laut)

e. Menjaga dan mengawasi agar pohon-pohon di tepi sungai tidak ditebang, karena ikan akan menjauh sampai tengah laut

f. Penghubung antara nelayan dan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan perikanan

g. Meningkatkan usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan

h. Mengatur jadwal acara-acara ritual yang berhubungan dengan masyarakat nelayan, misalnya kenduri laut

Menurut Puspita (2017), menyatakan bahwasannya kedudukan Panglima Laot di wilayah laot sendiri yaitu sebagai pihak yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Panglima Laot juga ditugaskan untuk membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan program pembangunan perikanan dan juga dalam melestarikan adat-istiadat dan kebiasaan yang masih dilakukan oleh masyarakat nelayan. Saat proses pelaksanaan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut, Panglima Laot selalu berpatokkan pada hukum adat laut. Hukum adat laut merupakan aturan-aturan adat yang sudah dipelihara dan dipertahankan keberadaanya oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan. Hukum adat laut juga dapat berfungsi sebagai hukum positif nasional, apabila dalam hukum nasional tidak ada pengaturan mengenai hal tersebut.

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ada beberapa kearifan lokal yang diciptakan oleh masyarakat Aceh. Pada pengelolaan kearifan lokal tersebut panglima laot juga dibantu oleh beberapa intansi pemerintah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa kearifan lokal yang ada di Nanggroe Aceh

Darussalam dan keikutsertaan instansi pemerintah dalam pengelolaan kearifan lokal yang ada di Aceh:

3.3.1 Kearifan Lokal Di Aceh yang Masih Terkait dengan Panglima Laot

Menurut Nurdin (2013), kearifan lokal telah lama digunakan oleh masyarakat, kearifan lokal sendiri dipergunakan dalam mengatur mengenai norma dan nilai dalam berperilaku dan berinteraksi dengan Tuhan, manusia dan dengan alam. Kearifan lokal juga bisa digunakan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya saja seperti penyelesaian masalah-masalah yang sudah ada di masyarakat seperti halnya dalam kerangka adat yang keterkaitannya sangat erat dengan nilai-nilai agama. Kearifan lokal seperti *di'iet*, *sayam*, *suloh*, *peusujuk* dan *peumet jaroe* merupakan proses penyelesaian masalah yang berbasis adat yang keberadaannya sendiri sudah lama ada di masyarakat Aceh. Pola tradisi tersebut merupakan pola-pola yang digunakan dalam proses penyelesaian masalah dengan sangat demokratis tanpa adanya kejadian pertumpahan darah dan dendam di antara pihak-pihak yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Berikut ini adalah penjelasan mengenai macam-macam kearifan lokal yang masih ada keterlibatannya dengan panglima laot:

a. *Di'et* atau *Diyat*

Pola *di'et* merupakan pola yang digunakan masyarakat Aceh dengan cara membayar kerugian. Biasanya proses pembayaran menggunakan pola *di'iet* dilaksanakan dengan proses upacara adat. Proses upacara adat tersebut terdiri dari beberapa kegiatan *peumat jaroe* dan *peusijuek*. Keikutsertaan institusi adat dan budaya saat proses penyelesaian kasus pidana ini bertujuan untuk menghilangkan perasaan dendam yang nantinya kemungkinan akan muncul diantara pihak yang terkait dengan masalah.

Penyelesaian masalah yang menggunakan pola *di'iet* diperuntukkan agar nantinya bisa menghilangkan rasa dendam dan rasa permusuhan yang berkepanjangan antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan konflik tersebut. Terjadinya peristiwa pembunuhan dan kekerasan di kalangan masyarakat Aceh pertamanya muncul dari permasalahan yang dimulai dari perebutan lahan perikanan, pertanian, penguasaan sumber-sumber ekonomi gampong atau hal-hal lain yang bisa saja akan terjadi di kalangan masyarakat.

Salah satu contoh kasus yang telah terjadi dan juga menggunakan pola *di'iet* yaitu seperti halnya pembayaran *diyat* yang diberikan kepada masyarakat Aceh yang telah meninggal dan luka setelah terjadinya konflik tersebut. Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Provinsi Aceh sejak tahun 2002 yang kemudian diambil alih oleh Badan Rekonstruksi Aceh (BRA) sejak tahun 2005 telah bertugas dalam pengelolaan dana *diyat*. Jumlah dana *diyat* dari para korban konflik tersebut biasanya akan dibagikan dan masing-masing akan menerima sebesar Rp 3 juta/tahun untuk kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2011 dana *diyat* termasuk juga bantuan ekonomi telah terkumpul sebesar 2.2 Triliun

b. *Sayam*

Salah satu pola yang juga digunakan masyarakat Aceh dalam penyelesaian masalah yaitu pola *Sayam*. Pola penyelesaian konflik ini telah lama digunakan dan bahkan penggunaannya jauh lebih lama dari pola *di'iet* atau *suloh*. *Sayam* sendiri merupakan bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan kepada korban atau ahli waris jika korban tersebut mengalami kerusakan atau tidak berfungsinya kembali anggota tubuh, kompensasi tersebut diberikan dari pelaku pidana yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Bahkan beberapa daerah yang ada di Aceh juga memberalkukan

pola *sayam* ini sebagai pola penyelesaian dengan cara memberikan kompensasi jika terjadinya penganiayaan hingga mengakibatkan keluarnya darah. Pola ini masih banyak digunakan para masyarakat yang berada di pantai Utara Aceh saat terjadinya sebuah masalah antar para warga. Masalah-masalah tersebut biasanya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat tanpa adanya rasa dendam antar pihak-pihak yang bersangkutan, agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan damai tanpa adanya permasalahan selanjutnya.

Menurut Kasim dan Nurdin (2016) contoh kasus yang menggunakan pola *sayam* yaitu yang terjadi di Kecamatan Indrapuri, kasus tersebut yaitu adanya perkelahian antar dua orang petani. Setelah adanya perkelahian tersebut, salah satu petani mengalami luka. Penyelesaian masalah tersebut menggunakan proses perdamaian antara kedua pihak yang dilakukan dengan proses adat yaitu dengan membayar 2 mayang emas (1 mayang setara dengan 3 gram emas). Permasalahan tersebut terjadi di Kecamatan Lhoong yang mana jika terjadi masalah maka daerah tersebut akan ikut didenda dengan harus membayar seekor kambing. Pada kasus yang lainnya diharapkan dari pihak-pihak yang berkonflik diharuskan membayar sejumlah uang, ada juga yang menyediakan makanan berupa *beulukat* (nasi ketan).

c. *Suloh* atau *Islah*

Istilah *suloh* sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu al-sulhu- islah, yang artinya upaya perdamaian. Pola *Suloh* juga digunakan untuk proses perdamaian antara beberapa pihak yang bermasalah. Pada tradisi penyelesaian konflik masyarakat Aceh, *suloh* biasanya menangani tentang upaya perdamaian yang biasanya dilakukan diluar dari kasus pidana atau biasanya lebih mengarah ke kasus perdata tanpa adanya korban yang terluka. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyelesaian masalah

menggunakan pola *suloh* tersebut, maka tidak diperlukan adanya kegiatan penyembelihan hewan kerbau atau kambing, karena kegiatan atau prosesi tersebut akan dilakukan jika terdapat korban yang meninggal atau rusaknya anggota tubuh.

Beberapa kasus perdata yang sudah dilakukan dengan pola *suloh* tersebut biasanya selalu berkaitan dengan perebutan dari sentra-sentra ekonomi seperti halnya batas tanah, daerah aliran sungai yang menjadi tempat penangkapan ikan, lapak tempat berjualan dan juga tali air (irigasi).

Penyelesaian masalah menggunakan pola *suloh* ini, selalu diselesaikan di tempat kejadian langsung oleh para petua adat yang menguasai tempat terjadinya konflik tersebut, tanpa harus ke *keuchik* atau *teungku meunasah*.

Penyelesaian kasus-kasus seperti ini, biasanya merupakan kasus yang ringan dan cukup dilakukan proses bersalam-salaman atau (*peumat jaroe*).

Sebagai contoh pola *suloh* digunakan masyarakat Aceh dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam Qanun PLH.

d. *Peumat Jaroe* dan *Peusijuek*

Peumat Jaroe dan *Peusijuek* adalah pola yang juga digunakan dalam penyelesaian masalah yang juga masih termasuk dalam kearifan lokal yang kaitanya masih erat dengan pola *di'iet*, *sayam* dan *suloh*. *Peusijuek* merupakan cara tawar-menawar dari beberapa pihak yang ikut terlibat dalam konflik dan sengketa dalam upacara adat. Setelah dilakukan *peusijuek* selanjutnya dilakukan sesi *peumat jaroe* yang berarti saling berjabat tangan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pola ini selalu memegang teguh peranan yang penting dalam menghubungkan rasa persaudaraan antara para pihak yang berkonflik atau bersengketa. Jika belum menggunakan pola *peusijuek* dan *peumat jaroe* maka konflik tersebut belum sempurna penyelesaiannya menurut masyarakat Aceh sendiri. Berdasarkan

hal tersebut saat dilakukannya proses *peumat jaroe*, pihak-pihak yang terkait diharuskan mengucapkan kata-kata khusus seperti; “*Nyoe kaseb oh no, bek na deundam le. Nyoe beujeut keu jalinan silaturrahmi*, karena nyan ajaran agama geutanyoe” (Masalah ini cukup di sini dan jangan diperpanjang lagi). Tanda berjabat tangan yang telah dilakukan diharapkan menjadi permulaan kembali dari jalinan silaturrahmi antara para pihak yang terkait.

Salah satu contoh yang menggunakan pola *peumat jaroe* dan *peusijuek* yaitu saat terjadinya perkelahian dan bentrok antara para pelajar yang berasal dari mahasiswa Aceh Tengah dengan Aceh Selata, yang mengakibatkan ada 48 sepeda motor yang terbakar dan belasan orang luka-luka dalam acara Pekan Olahraga Pelajar di Banda Aceh 27 Juni 2012. Kerugian yang dialami akibat terbakarnya beberapa motor saat kejadian tersebut, akan diganti oleh pemerintah provinsi sebesar 50%, dan kekurangannya akan diganti oleh pemerintah kedua kabupaten tersebut masing-masing sebesar 25%, dengan jumlah dana yang harus disiapkan sebesar Rp. 418.000.000,-. *Peusijuk* dilakukan di lapangan harapan bangsa. Pendamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan dipandai dengan juru damai yaitu Gubernur Aceh Bapak dr. Zaini Abdullah dan yang akan melakukan prosesi *peusijuk* adalah Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Bapak Drs. Abdurrahman Kaoy.

3.3.2 Keikutsertaan Pemerintah dalam Mendukung Panglima Laot untuk Pengelolaan Kearifan lokal Di Aceh

Pemerintah juga ikut andil dalam pengelolaan kearifan lokal di Aceh, dengan cara mengeluarkan program revitalisasi kearifan lokal yang bertujuan untuk membantu panglima laot dalam menjalankan tugasnya. Menurut KKP (2021), berdasarkan UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, UU No. 31 tahun 2004 Jo. UU No. 1

Tahun 2014 Pasal 21 ayat 1, UU No 32 Tahun 2014 Pasal 70 ayat 4(a), penguatan masyarakat hukum adat merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya revitalisasi Tahun 2016-2021:

a. Tahun 2016 : Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Adat/Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K)

b. Tahun 2017 : Identifikasi dan Pemetaan dan Pendampingan Kearifan Lokal Masyarakat Adat/Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K), Pendampingan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat/Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

c. Tahun 2018 : Identifikasi dan Pemetaan, Pendampingan Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat/Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K), Pendampingan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat/Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K), Memfasilitasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat/Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

d. Tahun 2019 : Pendampingan Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat/Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K), Fasilitas Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat/Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K)

e. Tahun 2020 : Fasilitas Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat/Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K), Fasilitas Penguatan Kemandirian Masyarakat Hukum Adat/Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K)

f. Tahun 2021 : Fasilitas Penguatan Kemandirian Masyarakat Hukum Adat/Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K)

Diharapkan dengan adanya revitalisasi yang dilakukan pemerintah tersebut bisa meningkatkan penguatan terhadap kearifan lokal yang ada di Indonesia khususnya masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Berdasarkan hasil diatas, dapat dikatakan peranan panglima laot dalam pengelolaan kearifan lokal di Aceh juga sangatlah penting, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bahwasannya panglima laot merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam melestarikan adat dan kebiasaan yang berlangsung di masyarakat nelayan dan bertugas juga sebagai pihak yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau disebut juga dengan adaptor sosial. Peran pemerintah juga ikut dalam pengelolaan kearifan lokal di Aceh dengan dikeluarkannya revitalisasi masyarakat adat agar budaya tersebut tidak hilang dan tetap lestari di masyarakat.



4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian *literature review* yaitu:

1. Panglima Laot keberadaannya telah ada sejak abad ke-14 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa lalu, Panglima Laot merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan Iskandar muda atas wilayah maritim di Aceh. Tugas Panglima Laot pada zaman dahulu dan setelah kemerdekaan sedikit berubah. Panglima Laot terdiri dari Panglima Laot Provinsi, Panglima Laot Kabupaten/Kota dan Panglima Laot Lhok. Pada zaman dahulu, lembaga panglima laot merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan Iskandar Muda atas wilayah maritim di Aceh.
2. Peranan Panglima Laot dalam pengelolaan perikanan tangkap di Aceh seperti membuat peraturan mengenai tata cara penangkapan, tata cara pemasangan alat tangkap yang akan digunakan serta pengelolaan pelarangan perusakan ekosistem dengan membuat sanksi untuk masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Saat pengelolaan perikanan tangkap yang dilakukan oleh Panglima Laot juga menghadapi hambatan dan tantangan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat nelayan sendiri. Pengelolaan perikanan tangkap oleh Panglima Laot sendiri juga bekerjasama dengan instansi pemerintah seperti KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Syahbandar serta Polisi Perairan.
3. Peranan Panglima Laot dalam pengelolaan kearifan lokal di Aceh dengan mengacu pada keputusan KKP mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan seperti pelestarian adat dan kebiasaan masyarakat nela

Aceh serta sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Pengelolaan tersebut juga bekerjasama dengan pemerintah seperti KKP dengan mengeluarkan program revitalisasi masyarakat adat, program tersebut diharapkan dapat membantu melestarikan budaya seperti masyarakat adat di Indonesia sendiri.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian, dapat diberikan saran sebagai berikut:

4.2.1 Saran Akademis

1. Pemerintah

Diharapkan untuk pemerintah saat membuat sebuah kebijakan atau peraturan-peraturan yang mengenai pengelolaan perikanan tangkap dan kearifan lokal selalu senantiasa melibatkan masyarakat, agar nantinya tidak ada keributan atau kesalahpahaman saat kebijakan atau peraturan tersebut dikeluarkan.

2. Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian *literature review* ini dapat menambah wawasan dan membantu peneliti selanjutnya saat mencari informasi yang terkait agar mempermudah dalam proses pengerjaan nantinya.

3. Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi contoh kepada masyarakat lainnya agar selalu melestarikan kebudayaan khususnya hukum adat dan kearifan lokal, agar nantinya bisa terus dinikmati oleh penerus-penerus selanjutnya.

4.2.2 Saran Praktis

1. Menempatkan Panglima Laot menjadi lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan perikanan tangkap dan kearifan lokal di Provinsi Aceh
2. Meningkatkan lagi kerjasama yang sudah terjalin antara Panglima Laot dengan pemerintah dan juga dengan masarakat nelayan agar pengelolaan perikanan tangkap dan kearifan lokal di Aceh semakin maju.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A., Tripa, S., Muttaqin, T. 2006. *Selama Kearifan Adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*. Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaga Hukum Adat Laot/Panglima Laot Aceh.

Alhusain, A. S. 2019. Kebijakan Perikanan Yang Pro Nelayan Tangkap. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol 9 (22): 19-24.

Apriana, E. 2016. Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Dalam Konservasi Laut. *Jurnal Serambi Saintia*. Vol 4 (1): 57-66.

Asyiawati, Y., & Akliyah, L. S. 2014. Identifikasi Dampak Perubahan Fungsi Ekosistem Pesisir Terhadap Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong. *Jurnal Perencanaan Wilayah Kota*. Vol 14 (1): 1-13.

Dahuri, R. 2018. Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Vol 17 (2): 139-171.

Daniah. 2016. Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Sebagai Basis Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan*. Vol 5 (2).

Daudy, M. H. 2015. Perwujudan Kedaulatan Laut Di Aceh Berbasis Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Menurut Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Hukum*. Vol 10 (1): 59-67.

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. 2021. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Diakses melalui <https://dkp.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2016/10/11/107/tugas-pokok-dan-fungsi.html>. Juli 2021.

Fauzi, A. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan*. https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_perikanan_dan_kelautan/oct7YB1DNC4C?hl=id&gbpv=1&dq=Pengertian+Kelembagaan&pg=PA71&printsec=frontcover

Fitrah, R. 2018. Peradilan Gampong Sebagai Wadah Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Public Policy*. Vol 3 (1): 49-63.

Imran, Z., Yamao, M. 2014. Konstruksi Peran Panglima Laot Lhok Menuju Tatakelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah Berbasis Sosial-Ekologi Sistem. 37-62

Kasim, F. M., Nurdin, A. 2016. Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Ekosistem dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe. *Journal Culture, Economy, Social Changes*. Vol 5 (1): 5-21.

Kelana, A. S. 2018. Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat: Studi Kasus Di Wilayah Gampong

Lampulo. 19-45.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap: Profil DJPT. Diakses melalui <https://kkp.go.id/dipt/page/12-profil-dipt>. Juni 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Penguatan Pengelolaan Perikanan Melalui Penguatan Kearifan Lokal di WPP 571/571 Aceh. Diakses melalui https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/penguatan-pengelolaan-perikanan/Adli_Unsyiah_Webminar%20Kearifan%20Lokal%20Panglima%20Laot.pdf. Juni 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Revitalisasi Hukum Adat (07.40). Diakses melalui <https://drive.google.com/file/d/11Sq5ZnNn-4aASFHMxF3XaZh4bF12Ns6D/view>. April 2021.

Mustaqim. 2018. Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Perikanan Di Era Desentralisasi. *Jurnal Sains dan Humaniora*, Vol 2 (1): 91-104.

Nuraini. 2013. Studi Kelembagaan Panglima Laot Dalam Pengelolaan Perikanan Pursesese Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. 1-48.

Nurdin A. 2013. Revitalisasi Kerifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat. Vol 13 (1):135-154.

Nurdin., Susilo, E., Indrayani, E., Puspitawati, D., Rahmawati, Y. 2017. *Hukum Perikanan*. Malang. Universitas Brawijaya Press.

Primyastanto, M., Dewi, R. P., & Susilo, E. 2010. Perilaku Perusakan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*. Vol 1 (1): 1-11.

Puspita, M. 2017. Kearifan Lokal Dalam Pengeloalan Sumber Daya Pesisir Dan Laut. *Jurnal Kajian Kebudayaan*. Vol 3 (2).

Rahayu, S. Q. 2014. Lembaga Penyelesaian Sengketa Laut "Panglima Laot" di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1 (3): 448-467.

Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., Amin, A.S. 2014. Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*. Vol 3 (1): 47-56.

Rizqi, R., Simbolon, D., & Mustaruddin. 2017. Interaksi Kebijakan Perikanan Tangkap Dan Kearifan Lokal Di Perairan Aceh. *Albacore Jurnal Perikanan Laut*. Vol 1 (3): 257-264.

Sulaiman. 2011. Model Pengelolaan Perikanan Berbasis Adat Laot Di Lhok Rigaih Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Peengelolaan Perikanan Berbasis Adat Laot*. Vol 40 (1): 18-24.

Unaradjan, D. D. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Universitas Katolik

Indonesia Atma Jaya

Wahono, R. S. (2020). Systematic Literature Review: Pengantar, Tahapan Dan Studi Kasus. Diambil dari <https://romisatriawahono.net/2016/05/15/systematic-literature-review-pengantar-tahapan-dan-studi-kasus/>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020 jam 20.32 WIB.

Waluya, B. 2004. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. https://www.google.co.id/books/edition/Sosiologi_Menyelami_Fenomena_Sosial_di_M/8XRHeOLMFNUC?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+struktur+sosi+al&pg=PA2&printsec=frontcover

Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Nanggroe Aceh Darussalam. Universitas Malikussaleh Press.

Yulindawati. 2017. Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh Dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap. *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol 7 (1).

Yurista, A.P. 2016. Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Legilasi Indonesia*. Vol 13 (2): 213-121.

Zulmansyah. 2017. Panglima Laot dan Pendampingan Masyarakat Nelayan: Studi di Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat, Kabupaten Simeulue. 1-98.

